

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693021/2026

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03
Tanggal : 22 Februari 2026

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 - 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 - 4. Kode/Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
 - Sebesar : Rp. 2.200.603.000 (DUA MILIAR DUA RATUS JUTA ENAM RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang
Rp. 2.200.603.000
Rp. 2.200.603.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	2.200.603.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 2.200.603.000

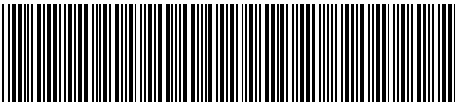
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4835-1669-1013-7210

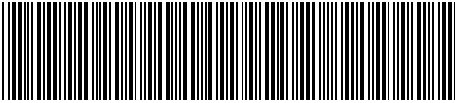
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							2.200.603.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah							2.200.603.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi					150,00 orang	60.000.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual					150.00 orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya					2,00 layanan	1.377.133.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah					1.00 layanan	1.130.133.000
		02	BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah					1.00 layanan	247.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik					2,00 dokumen, Peta, Data	763.470.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah					2.00 Data	763.470.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2026
I B. SUMBER DANA



DS:4835-1669-1013-7210

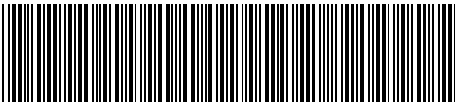
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.200.603.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4835-1669-1013-7210

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

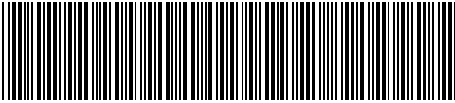
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693021	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	-	2.200.603	-	-	-	2.200.603	33 . 51	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.200.603	-	-	-	2.200.603		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.200.603	-	-	-	2.200.603		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	60.000	-	-	-	60.000		
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	1.377.133	-	-	-	1.377.133		
04	PNBP	-	1.377.133	-	-	-	1.377.133		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	763.470	-	-	-	763.470		
04	PNBP	-	763.470	-	-	-	763.470	065@	
JUMLAH		-	2.200.603	-	-	-	2.200.603		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4835-1669-1013-7210

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

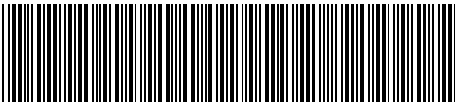
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693021	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	90.790	98.823	189.168	140.523	164.382	380.506	147.580	110.965	331.979	157.341	388.546	2.200.603
		BELANJA BARANG	0	90.790	98.823	189.168	140.523	164.382	380.506	147.580	110.965	331.979	157.341	388.546	2.200.603
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	90.790	98.823	189.168	140.523	164.382	380.506	147.580	110.965	331.979	157.341	388.546	2.200.603
	135.05.BF.7121	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	90.790	98.823	189.168	140.523	164.382	380.506	147.580	110.965	331.979	157.341	388.546	2.200.603

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2026
IV A. B L O K I R



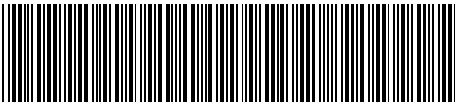
DS:4835-1669-1013-7210

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693021] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693021	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.620
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 787.468		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	52 Belanja Barang Rp. 787.468	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.551
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.146	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 323.498
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.190	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.301
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	7121.BMA	Data dan Informasi Publik
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.898	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.833
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 250	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.510
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.750	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 230.027
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2026
IV A. B L O K I R



DS:4835-1669-1013-7210

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693021] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

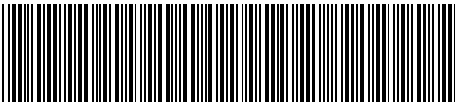
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Rp. 21.894		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2026
IV B. C A T A T A N



DS:4835-1669-1013-7210

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693021] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001